



Manajemen Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Dewi Siti Solihah

UPI Kampus Cibiru, Kota Bandung, Indonesia

Email: dewisitisolihah@upi.edu

Nenden Ineu Herawati

UPI Kampus Cibiru, Kota Bandung, Indonesia

Email: nendenineu@upi.edu

Indra Nugrahayu Taufik

Universitas Bale Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Email: indranugrahayutaufik@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 03-12-2023

Revised : 27-01-2024

Accepted : 30-01-2024

Published : 03-02-2024

ABSTRACT

This research explains the management of implementing inclusive education in elementary schools. A literature study approach was used in this research. As an embodiment of equitable education for both children in general and children with special needs, it is necessary to implement inclusive education programs implemented by schools, especially in elementary schools. The management of inclusive education programs in elementary schools needs to be optimized so that all children can experience education anywhere and for anyone. The role of the school principal as the highest decision-holder in an institution greatly influences the direction and goals that the institution wishes to achieve. From this research, it can be concluded that in the implementation of inclusive education, there are important basic principles, namely the implementation of inclusive education that is friendly, flexible, open, accommodates needs, and is willing to make system changes. By implementing good management of inclusive education programs, especially in elementary schools, it will provide very effective benefits, namely fighting discriminatory attitudes, creating a society that is willing to accept the arrival of extraordinary children, and realizing education for all.

Keywords: Education Management; Inclusive Education; Children with Special Needs; Elementary School

How to cite:

Solihah, D. S., Herawati, N. I., Taufik, I. N. (2024). Manajemen Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JIPPSD)*, 8(1), 80-93. Article DOI: <https://doi.org/10.24036/jippsd.v8i1.126272>

Corresponding E-mail: dewisitisolihah@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Salah satu faktor yang menjadi sumber keberhasilan dalam pendidikan yaitu guru. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik saja, tetapi guru adalah sebagai pendidik. Tugas guru sebagai pendidik meliputi mengajar, membimbing, dan melatih peserta didiknya. Peserta

Dewi Siti Solihah, Nenden Ineu Herawati, Indra Nugrahayu Taufik didik memiliki latar belakang yang beranekaragam. Mereka merupakan manusia yang unik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dijelaskan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan mempercepat pelaksanaan wajib belajar 9 tahun”. Dengan mengacu kepada undang-undang tersebut, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus. Ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menerangkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (Bahri, 2022). Dengan demikian, maka pendidikan seyogyanya harus dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Hardy & Woodcock (Kielblock & Woodcock, 2023) mengemukakan bahwa pengembangan kebijakan seringkali kurang mendapat perhatian untuk mempromosikan pendidikan yang benar-benar inklusif.

Dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dengan tidak membedakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya yaitu dengan adanya sekolah inklusif. Dalam pendidikan inklusif semua anak memperoleh perlakuan yang sama, tidak anak yang merasa diistimewakan. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Namun dalam pelaksanaannya belum seluruh sekolah dapat melaksanakan pendidikan inklusif, dan juga sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif belum seluruhnya terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal ini dibutuhkan optimalisasi dalam manajemen sekolah terkait program pendidikan inklusif khususnya di sekolah dasar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian lebih dalam lagi terkait pendidikan inklusif. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai “Manajemen Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Dalam studi penelitian ini, studi kepustakaan menjadi pilihan. Menurut Syaibani (Azizah & Purwoko, 2019) studi pustaka merupakan segala kegiatan yang dilakukan seseorang yang sedang melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang akan atau sedang diteliti. Adapun menurut Sugiyono (Ramanda et al., 2019) yang menyatakan bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoretis dan berbagai sumber rujukan yang tidak akan lepas dari bahan bacaan ilmiah. Dari dua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penelitian dengan metode kepustakaan peneliti melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkenaan dengan apa yang sedang diteliti dengan mengambil rujukan dari bahan bacaan ilmiah.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data, diambil dari tiga kata kunci yang terdapat dalam artikel ini yaitu kurikulum merdeka, karakter, dan krisis peradaban. Sumber diperoleh dari referensi artikel secara *online* dan juga buku yang berhubungan dengan penguatan pendidikan karakter dalam menghadapi krisis peradaban. *Google Scholar* menjadi pilihan referensi utama yang digunakan dalam studi ini. Sumber referensi dicari pada buku yang berkaitan dengan kata kunci tersebut.

Kriteria bahan referensi artikel dan buku yang diambil untuk penelitian ini yaitu artikel dan buku yang dipublikasikan atau diterbitkan lima tahun terakhir. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi data yang terbaru yang masih hangat menjadi pembicaraan berbagai pihak.

Menurut Zed (Azizah & Purwoko, 2019) bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian dengan metode studi kepustakaan ini, yaitu: (1) Mempunyai gagasan tentang hal yang akan diteliti; (2) Mencari informasi mengenai berbagai hal yang mendukung gagasan atau topik dalam penelitian; (3) Mempertegas fokus penelitian; (4) Mencari dan menemukan rujukan yang diperlukan serta mengelompokkan bahan bacaan; (5) Membaca dan mencatat hasil penelitian; (6) Meninjau dan menambah bahan bacaan kembali; (7) Mengelompokkan bahan bacaan dan mulai menulis.

2.3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis isi. Menurut Krippendorff analisis isi ini dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Pada tahap analisis ini, dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan. Agar proses pengkajian data terjaga dan mencegah kesalahan informasi, maka akan dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar yang diberikan dari pembimbing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang melatar belakangi adanya program sekolah inklusif adalah semua anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Menurut Wardani (Candra Pratiwi, 2015) bahwa manusia secara umum memiliki kebutuhan yaitu kebutuhan dalam aspek fisik atau terkait kesehatan, kebutuhan dalam aspek sosial emosional, dan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal manusia memiliki kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang merata, maka dilaksanakan sekolah inklusif yang didalamnya terdapat program tentang pendidikan inklusif. Agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya optimalisasi manajemen sekolah terkait program tersebut.

3.1. Manajemen Pendidikan

Nurhadi (Agustin, 2017) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia. Jadi manajemen itu dibuat oleh manusia dan

dipergunakan juga oleh manusia. Dalam manajemen terdapat manajemen dalam pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan.

Manajemen Pendidikan ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sebuah sekolah. Menurut Komalasari et al (Arsanti & Rosita, 2023) bahwa keberadaan kepala sekolah begitu penting dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah dapat mengubah wajah sekolah menjadi lebih baik atau buruk seiring berjalannya waktu sesuai dengan kualitas manajemen yang diterapkan.

Agar program pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya optimalisasi manajemen sekolah terkait program pendidikan inklusif tersebut. Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bahri, 2022). Manajemen pendidikan yang ada pada sekolah inklusi memberikan kewenangan secara penuh kepada kepala sekolah selaku manajer sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan dalam suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah.

Adapun fungsi dari administrasi pendidikan adalah sebagai alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya, guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu (Wati, 2007). Manajemen merupakan sebuah proses mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan melakukan perencanaan manajemen dengan optimal, maka program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di sekolah dasar khususnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya program pendidikan inklusi yang dilaksanakan oleh sekolah salah satu faktor yang menjadi penentunya yaitu dipengaruhi oleh manajemen kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Dengan demikian, maka penting sekali kepala sekolah dalam merencanakan program pendidikan inklusif yang akan dilaksanakan di sekolah dengan optimal.

Dalam melaksanakan optimalisasi terhadap manajemen pembelajaran pendidikan inklusif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pembelajaran pendidikan inklusif tersebut yaitu: (1) visi dan misi sekolah, (2) kondisi sekolah inklusi, (3) kondisi sekolah inklusi berdasarkan jumlah siswa ABK dan jenisnya, (4) kondisi sekolah berdasarkan keadaan sarana prasarananya, (5) kondisi sekolah inklusi berdasarkan suasana pembelajarannya, dan (6) kondisi sekolah berdasarkan ada dan tidaknya dukungan (Siti & Sholawati, 2019).

3.2. Pendidikan Inklusif

Pendekatan yang dilakukan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, seperti perbedaan karakteristik, kondisi fisik,

kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya dikenal dengan istilah inklusi (Arriani, Farah. et al., 2022). Booth & Ainscow (Gulsun et al., 2023) mengemukakan bahwa inklusi sebagai pendekatan sistematis untuk menghilangkan hambatan dari partisipasi semua peserta didik. Dalam inklusi ini semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, untuk belajar di kelas yang sama dengan siswa yang lainnya. Pemerintah telah menjamin semua anak dapat memperoleh pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 1995 Pasal 31 Ayat 1. Pemerintah akan memberikan layanan dan kemudahan dan menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan secara inklusif.

Pendidikan inklusif sudah diperkenalkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin (Herawati, N. I., 2021) adalah pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-temannya. Jadi dalam pendidikan inklusif ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama di kelas yang sama dengan situasi yang sama bersama teman-teman yang lainnya yang sebaya dengannya. Dengan pendidikan inklusif ini anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak-anak pada umumnya.

Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memiliki tujuan yaitu: 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa dan potensi kecerdasan dalam bidang akademik maupun non akademik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka; 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya dapat menghargai keanekaragaman, dan tidak memunculkan diskriminatif bagi semua peserta didik (Siti & Sholawati, 2019).

Ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam pendidikan inklusif. Prinsip tersebut yaitu pendidikan yang ramah, pengembangan seoptimal mungkin, kerja sama, dan perubahan sistem (Murniarti & Anastasia, 2016). Prinsip yang pertama yaitu bahwa pendidikan inklusif harus ramah. Ramah di sini yaitu mampu menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Prinsip pengembangan seoptimal mungkin memiliki makna bahwa pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Selain hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mampu bekerja sama, melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Prinsip yang terakhir harus berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Purwanta (Jauhari, 2017) terdapat beberapa alasan yang dapat menggambarkan manfaat dari diselenggarakannya Pendidikan inklusif di sekolah khususnya di sekolah dasar. Alasan yang paling mendasar yaitu bahwa semua anak baik anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak pada umumnya mempunyai hak yang untuk belajar bersama-sama. Dari alasan ini dapat dirasakan manfaatnya yaitu bahwa semua anak diperlakukan yang sama tanpa pengecualian. Setiap anak tidak dibeda-bedakan, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar. Tidak ada

alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun pertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.

Manfaat diselenggarakannya Pendidikan inklusif di sekolah bukan hanya dapat dirasakan oleh peserta didik saja, melainkan harus berdampak pula bagi semua masyarakat. Dampak yang paling jelas terlihat yaitu adanya perlakuan yang sama yang diterima baik oleh peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya.

Slee (Kielblock & Woodcock, 2023) menyatakan bahwa pendidikan inklusif dipahami sebagai hak semua siswa atas akses, kehadiran, partisipasi dan kesuksesan di sekolah lokal mereka. Dengan fokus pada sikap guru terhadap pendidikan inklusif, instrumen pengukuran dalam studi empiris yang relevan diperiksa. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen menggunakan fokus kata-kata yang eksklusif (kelompok) peserta didik tertentu. Tidak ada instrumen ideal yang sepenuhnya inklusif.

3.3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Menurut Mulyono dan Delfi (Candra Pratiwi, 2015) bahwa anak berkebutuhan khusus atau Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Grenier dkk (Yuwono & Mirnawati, 2021) dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: ABK temporer (sementara) dan permanen (tetap). Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi: anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan (anjral), anak-anak korban bencana alam, anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS. Sedangkan menurut Herawati (2021), anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis: (1) Disabilitas visual/Tuna netra: yaitu anak yang memiliki gangguan pada penglihatan; (2) Auditoriata/Tuna rungu: yaitu anak yang memiliki gangguan pada pendengaran; (3) Disabilitas intelektual atau tuna grahita/terbelakang mental: yaitu anak yang memiliki gangguan pada kecerdasan yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata/normal; (4) Disabilitas fisik/Tuna daksa: yaitu anak yang memiliki gangguan pada anggota tubuh sehingga ruang gerak tubuhnya terganggu; (5) Behavior/tuna laras: yaitu anak yang memiliki gangguan pada tingkah laku/emosinya; (6) Disabilitas ganda/tuna ganda: yaitu anak yang memiliki gangguan/hambatan lebih dari satu jenis kelainan; (7) Anak cerdas dan berbakat (Giftendness and Tallented): yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan disertai memiliki kecerdasan khusus; (8) Autis: yaitu anak yang mengalami gangguan dalam kontak sosial serta tampak seperti tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain; (9) Attention Deficit Disorder (ADD) jika disertai

hiperaktif: yaitu anak yang mengalami hambatan dalam pemusatan perhatian atau tidak bisa konsentrasi/fokus; (10) Disleksia: yaitu anak yang kesulitan dalam belajar; (11) Disgrafia: yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam belajar menulis; dan (12) Diskalkulia: yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam belajar berhitung

Dari uraian tentang beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, tentu saja ada faktor-faktor yang menyebabkan anak dapat memiliki kebutuhan khusus tersebut. Herawati (2021) kembali menyampaikan terkait faktor-faktor yang menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus. Faktor tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Hal ini diperoleh dari keturunan yang disebut dengan hereditas atau pembawaan yang disebabkan oleh adanya gangguan genetika. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar anak itu sendiri dan bukan faktor dari keturunan.

3.4. Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Sekolah

Ketika seorang anak diidentifikasi mempunyai berkebutuhan khusus, pendidikan luar biasa sewaktu-waktu diperlukan. Hal itu dikemukakan karena peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus tidak secara otomatis memerlukan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa akan sesuai hanya apabila kebutuhan peserta didik tidak dapat diakomodasi dalam program pendidikan umum. Singkat kata, pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu peserta didik.

Peran kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan serta perencanaan yang matang terkait bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan di atas, dan membuat perencanaan serta persiapan yang matang. Diperlukan adanya optimalisasi terhadap manajemen sekolah mengenai program pendidikan inklusif di sekolah dasar agar sekolah dapat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik dengan merata, adil tanpa membedakan-bedakan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak.

Nurhadi (Agustin, 2017) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menata Sumber Daya Manusia (SDM), kurikulum, maupun sumber belajar serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dari pengertian tersebut jelas bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dibutuhkan optimalisasi manajemen sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah agar kegiatan program pendidikan inklusif ini dapat berjalan dengan optimal.

Dalam hal pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat memengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, guru kelas, guru pembimbing khusus dan masyarakat akan berdampak baik pada tata kelola pendidikan inklusi. Dan

juga kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusi. (Ikramullah & Sirojuddin, 2021).

Van Meter dan Van Horn (Nurwan, 2019) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Dalam melaksanakan sebuah kebijakan dibutuhkan beberapa sumber daya yang dapat mendukung dalam terlaksananya sebuah program. Sumber yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan sebuah program yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya wewenang, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia yaitu adanya guru yang handal dan memiliki kepekaan terhadap pendidikan inklusif. Menurut Sharma & Nuttal (Sahli Lozano et al., 2022) pentingnya peran guru dalam proses pendidikan inklusif memberikan informasi kepada politisi dan pembuat kebijakan tentang persepsi guru dan tuntutan dukungan, membantu membentuk program pendidikan guru yang ditargetkan, dan memungkinkan untuk memantau perubahan dan kemajuan dalam penerapan pendidikan inklusif.

3.5. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah dasar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan panduan mengenai hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Panduan tersebut dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Berikut merupakan alur pelaksanaan pendidikan inklusif yang dapat kepala sekolah terapkan di sekolah dalam upaya untuk melaksanakan program pendidikan inklusif (Farah, Arriani. et al. 2022), yaitu: (1) Masa transisi; (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); (3) Identifikasi dan Asesmen; (4) Penyusunan Profil Belajar Peserta Didik; (5) Perencanaan Pembelajaran; (6) Proses Pelaksanaan Pembelajaran; dan (7) Program Pendidikan Individual (PPI).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penerapan program pendidikan individual dapat terlaksana dengan optimal: (a) Agar program dapat terlaksana dengan optimal, maka harus dilakukan pendekatan yang holistik; (b) Adanya pemahaman terkait pendidikan inklusif dari orang tua serta guru jika anak merupakan manusia dengan seluruh kelebihan serta kekurangannya. Setiap orang tua dan guru harus menerima terhadap kelebihan dan kekurangan anak. Ketika anak memiliki kelebihan, maka harus dihargai. Tetapi ketika anak memiliki kekurangan, maka guru maupun orang tua wajib menerimanya dengan ikhlas dan mencari solusi dengan menggunakan metode-metode yang dapat memulihkan kembali; (c) Membuat lingkungan sekolah yang nyaman baik dari lingkungan fisik ataupun lingkungan psikologisnya; (d) Penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya program; (e) Pengetahuan yang baik mengenai pelaksanaan program. Hal ini bisa guru peroleh dengan mengikuti kegiatan- kegiatan pelatihan terkait program; (f) Dalam proses pendidikan peserta didik yang tercantum dalam program pembelajaran individu harus terdapat Kerjasama yang

baik dari semua faktor; (g) Konsisten terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan; (h) Sekolah, orangtua, serta pemerintah dapat mendorong penuh program-program baik yang akan menjadikan anak berkebutuhan khusus berkembang.

Dalam menjalankan program ini, tentunya mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (a) Sulitnya menemukan waktu untuk duduk bersama membahas program antara semua pihak yang terkait; (b) Program yang tidak berjalan dengan baik akan menghambat kemajuan pertumbuhan anak. Dengan demikian hendaknya melaksanakan program-program pembelajaran secara tuntas serta berkesinambungan; (c) Kurangnya keahlian guru dalam membentuk serta memastikan program (Perdana, 2020).

3.5.1. Penilaian (Asesmen) Pelaksanaan pembelajaran

Arikunto (Marti, 2012) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Dalam hal ini yang diukur yaitu program pelaksanaan pendidikan inklusif yang sudah dibuat oleh sekolah. Penilaian bagi anak berkebutuhan khusus, tidak sama dengan anak pada umumnya. Penilaian anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut.

3.5.2. Laporan Hasil Belajar

3.6. Model Sekolah Inklusif

Dalam melaksanakan pendidikan inklusif, terdapat beberapa model yang dapat digunakan di sekolah dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Menurut Ashman (Darma & Rusyidi, 2015) terdapat enam model sekolah inklusif yang dapat digunakan dalam pelaksanaan sekolah inklusif. Model tersebut yaitu:

3.6.1. Kelas Reguler (Inklusi Penuh)

Dalam kelas reguler ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

3.6.2. Kelas reguler dengan Cluster

Dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3.6.3. Kelas Reguler dengan Pull Out

Dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

3.6.4. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out

Dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

3.6.5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.

3.6.6. Kelas Khusus Penuh

Dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular.

Stainback & Sianback (Herawati et al., 2018) menyatakan bahwa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu sekolah dimana semua peserta didik dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda ditempatkan dalam kelas yang sama. Program pembelajaran yang diberikan oleh sekolah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Sehingga dengan demikian, Tingkat keberhasilan peserta didik akan lebih terjamin karena guru telah memberikan layanan dan dukungan yang tepat.

3.7. Problematika Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat beberapa problematika yang dihadapi. Berikut beberapa problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (Ni'mah et al., 2022).

3.7.1. Peserta didik

Permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus yaitu anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas yang sama sehingga mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran karena memiliki sikap yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Ditambah lagi dengan kurangnya rasa empati dari peserta didik regular terhadap anak berkebutuhan khusus.

3.7.2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusif bersifat fleksibel, dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, dan dibuat dengan karakteristik dari lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri, tanpa mengesampingkan pedoman yang telah ada. Menurut Noviandari (Ni'mah et al., 2022) permasalahan yang sering terjadi terkait kurikulum yaitu pembelajaran dan penilaian belum sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum yang sesuai dengan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum peserta didik regular yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

3.7.3. Tenaga Pendidik

Menurut Tarnoto (Ni'mah et al., 2022) permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah inklusi berdasarkan persepsi dari tenaga pendidik (guru) yaitu kurang bahkan tidak ada guru pendamping kelas, kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus karena guru kurang memahami tentang anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, beban administrasi yang semakin berat. kurangnya kesabaran guru

dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dan kurangnya komunikasi dengan orang tua peserta didik. Guru harus mengembangkan kompetensi pedagogiknya dalam hal pembelajaran yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam membimbing, mengarahkan siswa untuk memahami materi yang sudah diberikan oleh guru (Ambarita, 2020). Menurut Zimmerman & Schunk (Amelia et al., 2020) guru harus lebih spesifik tentang aspek-aspek perhatian apa yang akan disertakan dalam pelajaran dan tipe memori apa yang akan diperhatikan.

3.7.4. Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran yang belum menggunakan sistem team teaching menyebabkan anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran.

3.7.5. Manajemen sekolah

Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zaini (Ni'mah et al., 2022) manajemen pendidikan pada sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah mengatur segala kebutuhan penyelenggaraan meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan dengan masyarakat.

3.7.6. Sarana dan prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia memegang peranan penting bagi anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka akan sangat bergantung pada media pembelajaran. Setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai beragam karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pihak sekolah inklusif juga perlu menyiapkan berbagai macam media pembelajaran.

3.7.7. Kerjasama

Aspek kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan pemerintah dan wali murid. Menurut Nurcahyani (Ni'mah et al., 2022) memaparkan bahwa peran aktif dari pemerintah masih kurang terhadap pelaksanaan sekolah inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi juga berkaitan dengan kerja sama antara pihak sekolah dengan orang tua. Sebagian besar orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus kurang mampu memberikan pendampingan belajar bagi anaknya di rumah. Mereka rata-rata disibukkan oleh karir dan pekerjaan di luar rumah, sehingga intensitas interaksi antara orang tua dan anak kurang.

3.7.8. Masyarakat

Secara umum masih terdapat masyarakat yang melihat dan mempunyai tanggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh, sehingga pada saat mereka berhadapan atau bertemu di lingkungan masyarakat, mereka akan memilih tidak peduli dan bahkan sampai menghindarinya.

4. SIMPULAN

Manajemen penyelenggaraan program pendidikan inklusif di sekolah dasar harus dioptimalkan agar semua anak dapat merasakan pendidikan di manapun dan bagi siapapun. Peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat mempengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat prinsip-prinsip dasar yang penting yaitu pelaksanaan pendidikan inklusif yang ramah, fleksibel, terbuka, mengakomodasi kebutuhan, dan ketersediaan melakukan perubahan sistem. Terdapat beberapa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ini. Problematika tersebut berasal dari berbagai aspek yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, kerjasama dan masyarakat.

Anak berkebutuhan khusus dapat diberikan pelayanan di sekolah umum dengan berbagai model tipe sekolah inklusif. Pelayanan yang diberikan bergantung dari jenis kebutuhan yang diperlukan. Guru harus lebih memahami terkait anak berkebutuhan khusus agar tepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Dengan pengoptimalan manajemen penyelenggaraan program pendidikan inklusif khususnya di sekolah dasar, hal ini akan memberikan manfaat yang sangat efektif yaitu untuk melawan sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang mau menerima kedatangan anak luar biasa, dan mencapai pendidikan untuk semua dengan pemberian pelayanan yang tepat sasaran dan tepat guna.

Manajemen dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif haruslah dibuat dengan optimal. Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam satuan Pendidikan harus menyusun program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang akan dilaksanakan agar tepat guna. Dengan demikian, semua anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, I. (2017). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Sumpersari 1 Kota Malang. *Education and Human Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33086/ehdj.v1i1.290>
- Ambarita, A. (2020). Pembentukan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SD melalui Hybrid Learning pada Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.24036/jippsd.v3i2.107571>
- Amelia, R., Sartono, K. E., & Pasani, C. F. (2020). Kajian Neuroscience dalam Pengembangan Ilmu Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24036/jippsd.v4i1.110447>
- Arsanti, N. P., & Rosita, T. (2023). *Membangun Kredibilitas Manajemen Pendidikan Dasar Melalui Penerapan Artificial Intelligence, Kompetensi Manajemen, dan Etos Kerja*. 7, 483–493.
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 7(2), 1–7.

Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2(1), 94–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>

Candra Pratiwi, J. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,” November*, 237–242.

Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223–227. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>

Farah, Arriani; Agustiyawati; Alifia, Rizki; Ranti, Widiyanti; Slamet, Wibowo; Christina, Tulalessy; Fera, Herawati; Theresia, M. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. In *Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)*.

Gülsün, İ., Malinen, O. P., Yada, A., & Savolainen, H. (2023). Exploring the role of teachers’ attitudes towards inclusive education, their self-efficacy, and collective efficacy in behaviour management in teacher behaviour. *Teaching and Teacher Education*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104228>

Herawati, N. I., Pendidikan, U., & Kampus, I. (2018). *Re-Interpretasi dan Re-Orientasi Pendidikan Inklusif*. 10(2), 128–132.

Herawati, N, I. (2021). Pendidikan Inklusif Dasar Teori dan Penerapan Pada Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK. Bandung: UPI Press.

Ikramullah, & Sirojuddin, A. (2021). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>

Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>

Kielblock, S., & Woodcock, S. (2023). Who’s included and Who’s not? An analysis of instruments that measure teachers’ attitudes towards inclusive education. *Teaching and Teacher Education*, 122, 103922. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103922>

Marti, A. D. (2012). Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(3), 1–13.

Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi, dan Strategi. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9–18.

Ni’mah, N. U., Istirohmah, A. N., Hamidaturrohmah, & Widiyono, A. (2022). Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jote*, 3(3), 345–353.

Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201–212. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>

Perdana, R. (2020). Pengembangan Model Program Pembelajaran Individu (Ppi) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusif Kota Metro. *Improvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 7(2), 69–88. <https://doi.org/10.21009/improvement.v7i2.17956>

Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5019>

Sahli Lozano, C., Wüthrich, S., Büchi, J. S., & Sharma, U. (2022). The concerns about inclusive education scale: Dimensionality, factor structure, and development of a short-form version (CIES-SF). *International Journal of Educational Research*, 111(September 2021), 101913. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101913>

Siti, O. :, & Sholawati, A. (2019). *Learning Management in Inclusion Education for Children With Special Needs At Sdn Kalirungkut-1 Surabaya*. 2(1), 37–53.

Wati, E. (2007). Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, XIV(2), 368–378.

Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020.

PROFIL SINGKAT

Dewi Siti Solihah, lahir di Bandung, 7 Februari 1984. Meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Cibiru, pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Cibiru.

Nenden Ineu Herawati, merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Cibiru. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) IKIP Bandung (1986), S-2 pada Program Studi Bimbingan dan Konseling (BK) UPI (2005), dan S-3 pada Program Studi Pendidikan Khusus (UPI) (2019).

Indra Nugrahayu Taufik, merupakan dosen di Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI Bandung (2006), S-2 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI Bandung (2010), dan S-3 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI Bandung (2021).